

Makalah

2.2.2

PRIMODIALISME DAN PROSES INTEGRASI* DI KALIMANTAN TENGAH

Oleh : Sidik R. Usop**

1. Pendahuluan

Studi ini bertolak dari pemikiran bahwa integrasi nasional dan daerah sedang mengalami ketegangan pada saat bangsa Indonesia mulai memasuki era demokratisasi. Beberapa kasus yang menonjol ditengah air adalah kasus Aceh, Papua, dan Riau yang menuntut untuk memisahkan diri dari kesatuan Republik Indonesia, disamping beberapa konflik etnis dan agama seperti di Maluku, Sambas, Poso dan Sampit.

Bangsa Indonesia yang dibangun atas “Kebhinekaaan” yaitu atas perbedaan agama, etnis, bahasa, ras nampaknya sedang mencari makna baru dalam hubungan berbangsa (nation) dan bernegara (state). Pada kasus diatas, Clifford Geertz (Kirana, 1989 : 5) menyebutkan sebagai upaya untuk menonjolkan identitas primordialisme dan dorongan yang kuat untuk membangun atas dasar inisiatif dan tanggung jawab lokal.

Primordialisme dan kegiatan pembangunan merupakan factor pencetus (impetus) terjadinya kekerasan. Primordialisme sebagai factor bawaan (given) dan hasil pewarisan seperti agama, kekerasan, kesukuan, bahasa dan kebudayaan. Identitas primordialisme ini akan menjadi sentimen primordial (Primordialism Sentiment), ketika kelompok agama atau kelompok etnis (kesukuan) mendapat perlakuan yang tidak adil, sehingga mendorong terciptanya ketegangan yang dapat

* Disajikan untuk forum Internasional Jurnal Antropologi Indonesia ke-2 di Padang tgl 18 – 21 Jili 2001

menimbulkan konflik. Meminjam istilah Dahrendorf, ketegangan yang terjadidalam masyarakat akibat tidak meratnya distribusi kekuatan (distribution of power) dan persaingan untuk mendapatkan sumber daya yang langka. Terkait dengan masalah ini Lewis Caser (Irving M. Zeitlin, 1995 : 157) melihatny adari sisi fungsional yaitu sebagai sesuatu yang positif, bagaimana konflik dapat memberi sumbangan pada ketahanan dan adaptasi dari kelompok, interaksi dan system sosial. Dengan demikian, pada setiap interaksi selalu terdapat konflik dan kompromi.

Konflik yang bersumber dari unsure-unsur primordialeseperti agama dan suku yang berhimpit (congruent) dengan ketidakadilan karena proses pembangunan (instrument) akan menimbulkan konflik yang menghasilkan kekerasan yang lebih dasyat dalam waktu yang labih lama.

Myron Wiener menulis dalam topik : Kebijakan Preferensi (blonde,1995: 440-444) menyebutkan bahwa pertama, perbedaan diantara kelompok etnis seringkali dipandang sebagai indikasi adanya perbedaan dalam kesempatan. Bukti bahwa masyarakat itu telah mengalokasiukan saluran pada pendidikan dan pekerjaan secara tidak adil, da bahwa kelompok dominan menggunakan posisi mereka itu untuk membatasi kelompok lainnya agar tidak dapat meningkatkan mobilitasnya. *Kedua*, jika perbedaan etnis menimbulkan konflik maka akibatnya seringkali menimbulkan lebih banyak orang yang terbunuh, pengusiran orang secara paksa, genosid, perang saudara dan berbagai keresahanyang berbenturan dengan kelompok etnis.

Dalam tataran dunia Internasional abad XXI, Samuel P. Huntington (2000:9) dalam bukunya *Benturan antar peradaban dan Masa Depan Politik*

Dunia, menyebutkan bahwa persaingan antar negara adidaya figantikan oleh adanya benturan antar peradaban. Mengutip pendapat Henry Kissinger, Huntington menjelaskan bahwa terdapat enam kekuatan utama yang memiliki peradaban yang berbeda yaitu Amerika Serikat, Eropa, China, Jepang, dan negara-negara Islam yang memiliki wilayah strategis, pendudu yang besar dan yang memiliki sumber daya minyakj yang sangat besar pengaruhnya terhadap dunia.

Konflik- konflik yang berbahaya pada masa yang akan dating adalah karena factor budaya, yaitu persaingan antar peradaban yang dapat meluas terhadap negara-neeegara lannya. Konflik di Yugoslavia, Rusia memberikan dukungan diplomatic kepada Serbia, sedangkan dalam konflik Bosnia, Arab Saudi, Iran, Turki dan Libya menyediakan bantuan dana dan persenjataan.

2. Kasus Kekerasan di Beberapa daerah di Indonesia

Beberapa penelitian dibawah ini memperlihatkan bahwa unsure-unsur primordial dapat menjadi sumber integrasi, yaitu fungsional bagi suatu tertib sosial (*sosial order*) dan sumber konflik yang disfungsional akibat adanya perbedaan yang dapat menimbulkan konflik yang bersifat laten dan manifes.

William Liddle (1970 : 206) dalam penelitiannya mengenai integrasi nasional yang memilih kasus di Simalungun dan Pemantang Siantar Sumatra Utara, dilatarbelakangi oleh oleh pemikiran bahwa hambatan integrasi di Indonesoa adalah, *pertama*, Pembelahan horizontal (*horizontal cleavages*) yang berakara pada suku, ras, agama dan geografi. *Kedua*, pembelahan (*Vertical Cleavages*) berupa masalah yang ditimbulkan akibat berkembangnya jurang pemisah antara elite dan massa antara lain menyangkut latar belakang pendidikan kekotaan yang menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang berpandangan tradisional dan pedesaan.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kelompok-kelompok primordial telah diintegrasikan kedalam partai politik. Partai-partai yang memasukkan unsur primordial telah mendapat perolehan suara yang cukup besar, yaitu PNI yang telah dengan perolehan suara dari etnis Jawa, Batak Tapanuli dan Batak Simalungun, Mayumi dengan perolehan suara dari belakang pemikirannya, Liddle melihat dimensi vertical sebagai integrasi politik yaitu penciptaan loyalitas etnis terhadap elit nasional yang diakumulasikan melalui partisipasinya dalam system demokrasi liberal yang berlaku pada kurun waktu tersebut. Sedangkan pada dimensi horizontal disebutkan sebagai peleburan loyalitas kelompok etnis kedalam partai-partai politik dan organisasi keagamaan yang senafas.

Unsur-unsur primordial ini dapat pula dijadikan sebagai alat mobilisasi masyarakat untuk kepentingan elit tertentu. Penelitian Candra Kirana (1988 : 18-20) mengenai kegiatan politik etnis di Sumatra Utara, dilatar belakangi oleh pemikiran Geertz bahwa sesuatu yang primordial adalah suatu kenyataan siaial yang terjadi secara alamiah dan bukan sebagai proses produksi sejarah. Selain itu disebutkan pula bahwa logika politik primordial dianggap tidak rasional, terbentuk secara alami dan dalam dirinya mengandung struktur kewajiban dan keistimewaan yang bersifat memaksa. Cara seorang individu mengukur kedudukannya terhadap individu lainnya, dalam struktur sosial ini merupakan proses yang tidak rasional.

Dengan menggunakan metode histories, Chandra Kirana menyimpulkan bahwa gerakan pembentukan Negara Sumatra Timur(NST) pada tahun 1948 adalah gerakan yang dipimpin oleh bangsawan daerah yang mencari dukungan politik terutama dari penduduk pribumi yang disebut "oraang asli". Salah satu factor yang memicu timbulnya gerakan ini adalah semakin luasnya peranan kaum

prndatang terutama dalam penguasaan tanah.

Berdasarkan hasil penelitiannya, Chandra Kirana melakukan kritik terhadap Geertz. Dia berpendapat bahwa dilihat secara histories dan structural maka politik berlandaskan kesukuan dapat dipandanga sebagai rasional yaitu motof untuk membentuk dukungan masa yang didasarkan pada kepentingan yang diperhitungkan dan pertimbangan yang rasional.

Berikut ini kajian dari Hefner (1999 :369) mrngrnai masarakat Tengger dalam topik : *Identitas Sosial dan Politik : kekerasan tahun 1965 –1966 dan dampak buruknya*. Kajian ini melukiska mengenai organisasi politik Indonesia yang dibangun atasa kesetiaan terhadap agama dan komunitas yang telah ada yaitu islam tradisional dan kejawen. Perbedaan penduduk dari garis kejawen dan islam ini dalam lingkungan yang lebih umum disebut sebagai politik identitasss. Islam tradisional meruakan NU yang menempati pegunungan Tengger bagian bawah, dan komunitas aliran kejawen yang menempati pegunungan Tengger bagian atas.

Pembantaian terhadap bangsa kejawen yang beraliansi pada PKI dilakukannya oleh warrga NU yang dimobilisasikan oleh militer dan ketertiban elit-elit lokal yang duangkat oleh program Landereform PKI..

Ketiga penelitian diatas sangat dipengaruhi oleh pemikiran Geertz mengenai konsep *revolusi integrative*, yaitu menguatnya kelompok-kelompok primordial daalam masyarakat, dan tersebar di lingkup bangsa (Liddlee, 1970 : 57) pada sati sisi, Liddle mengedepankan tertib sosial dalam kehidupan bernegara, dan mengintegrasikan unsure-unsur primordial kedalam ideology partai. Pada sisi lain Kirana dan Hefner melihat bahwa ikatan primordial sebagai salah satu yang sudah ada dan menjadi suatu kekuatan ketika kepentingan mereka terusik oleh kekuatan diluar ikatan primordial mereka.

Berapa kasus penelitian dibawah ini memperlihatkan bahwa dalam kehidupan masyarakat yang lebih kompek, perbedaan-perbedaan agama dan etnis (suku) telah dipertajam oleh kesenjangan pembangunan, persaingan ekonomi dan pertentangan kekuasaan di tingkat elit, sehingga mendorong terjadinya kekerasan yang bersifat komunal dan mendapat legitimasi dari kelompok yang melakukan kekerasan.

Kasus Situbondo pada tahun 1966 berawal dari penghinaan terhadap agama Islam. Ketidakpuasan massa atas putusan jaksa dan tindakan kasar pihak keamanan dalam mengusir massa, bahkan salah satu anggota keamanan memukul kepala seorang anak kecil yang hendak menonton sidang hingga berdarah. Dibalik kejadian tersebut (Haryanto (1998 : 12-3) yang mengutip hasil penelitian dan intervidei, menyebutkan terdapat beberapa persoalan yang menghimpit masyarakat Situbondo yang kuat mempertahankan identitas model pendidikan pesantren.

Persoalan-persoalan yang terselubung tersebut adalah *pertama*, kekecewaan masyarakat atas kekalahan partai PPP atas Golkar dalam pemilihan umum 1987 dan 1992. Masyarakat Situbondo beranggapan bahwa PPP adalah partai islam yang harus didukung. *Kedua*, dari system ekonomi ketika dibangunnya instalasi kilang minyak terjadi ketegangan antara masyarakat dan pemerintah, menyangkut masalah ganti rugi tanah dan relokasi penduduk yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. *Ketiga*, Pengaruh kiai yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat pesantren, dalam menanamkan loyalitas para santri terhadap kiai. Oleh karena itu penghinaan terhadap agama islam berarti penghinaan terhadap kiai.

Kasus Tasik Malaya 1996 dan peristiwa 14-15 Mei di Jakarta, adalah kekerasan terhadap warga etnis keturunan China. Yusu Liem dalam bukunya

yang berjudul *Prasangka Terhadap Warga Etnis China* menyebutkan bahwa factor yang menyebabkan terjadinya kekerasan itu adalah *pertama*, kesenjangan ekonomi yang sangat tajam antara masyarakat lapisan atas dengan masyarakat lapisan bawah. *Kedua*, Aliansi China Totok (konglomerat) dengan birokrasi militer yang sangat berpengaruh dalam tatanan politik di Indonesia pada masa rezim Soeharto.

Liem (200 : 77) yang mrujuk pendapat Jenkin dan Robinson melihat fenomena tersebut sebagai peleburan elit politik dan ekonomi di masa Soeharto. Fungsi kelompok ini menjadi sangat jelads ketika badai krisis ekonomi meraeka dikorbankan debagai “ambing hitam” dalam scenario rezim Soeharto, yaitu antara tahun 1966-Mei 1998.

Khusus mengenai pertikaian etnis antara Dayak dan Madura, Sudagung (2001:117-119) dalam bukunya *Mengurai Pertikaian Etnis di Kalimantan Barat* menyoroiti pertikaian itu seebagai pertikaian budaya. Sifat etnis Madura digambarkan sebagai berikut : *Pertama*, manusia yang ulet dan jerja keras, sebagai akibat kesulitan hidup didaerah asal dan dorongan yang kuat untuk memperbaiki nasib. *Kedua*, Solidaritas yang kuat antara sesama etnis Madura merupakan tradisi yang dibawa dari tempat asal, yaitu system *tanean lanjang* (mengelompoik) dan didukung oleh tingkat pendidikan yang rendah. *Ketiga*, *budaya corak*, yaitu perkelahian dengan menggunakan senjata tajam yang terjadi secara perorangan atau kelompok. Keadaan ini tersirat dengan adanya ungkapan “*ango'an potea, tolong e tebang pote mate*” artinya dari pada putih tulang lebih baik berputih mata, yaitu lebih baik dari pada menanggung malu. Dengan demikian dalam budaya carok terdapat sifat agretivitas dari etnis Madura.

Salah satu factor utama yang membedakan antara etnis Madura dan Dayak

menurut Sinagung (2001 : 139), adalah ketrikatan suku dayak atas hokum dan adat kebiasaan sehingga terhindar dari perbuatan yang sewenag-wenang dan diskriminasi yang lebih kasar.

Dari sisi pendekatan wacana yang berkembang dalam masyarakat mengenai pertikaian etnis di Kalimantan Barat, ditemukan berbagai factor penyebab terjadinya pertikaian etnis tersebut. Syarif Ibrahim Al Qadri, sosiolog dan Guru besar pada FISIP Unair (D&R, XXVIII / 18 January 1997) mengemukakan bahwa hutan bukan hanya memiliki fungsi ekonomis tetapi juga memiliki makna cultural maupun ritual. Oleh karena itu, masyarakat Dayak sangat prihatin dan terpukul ketika hutan dikapling oleh penguasa HPH yang menyebabkan akses kehutan menjadi terbatas. Keterhimpitan ruang gerak, terganggunya system mata pencarian dan system ritual, menyebabkan warga Madura sebagai sasaran terdekat yang dianggap telah mengganggu system kehidupan masyarakat Dayak.

Nasikun, sosiolog Dari Universitas Gajah Mada (Adil, no 15 thn ke-65, 15-21 January 1997) menarik persialan pertikaian etnis Dayak-Madura dari masa orde baru. Pada waktu itu terjadi pembersihan birokrasi dari unsure-unsur yang dituduh “kiri” yang kebetulan kebanyakan terdiri dari otrang-orang dayak. Proses Marginalisasi politik ini kemudian didikuti oleh peminggiran d bidang ekonomi dengan datangnya orang-orang Melayu dan Madura. Dengan kata lain, orang-orang Dayak pribumi itu merasa tersingkir dalam proses transformasi ekonomi – Politik Orde Baru yang diperankan oleh negaradan kekuatan bisnis, baik nasional maupun internasional. Penggusuran terhadap orang madura, karena mereka merupakan representasi yang paling dekat dan kongrit dari kekuatan eksternal yang meminggirkan posisi orang Dayak.

Lukman Sutrisno, sosiolog dari pusat penelitian pembangunan pedesaan dan

kawasan (Warta pedesaan No.07 Thn XVI, Juli 1999) menyoroti pertikaian etnis tersebut dari sisi perbedaan budaya. Bagi orang Madura, membawa clurit adalah hal yang biasa, karena di Madura apabila orang tidak membawa clurit maka ia akan dianggap sombong karena menganggap dirinya kebal. Sementara orang dayak itu melihat bahwa *pamali* apabila orang menenteng senjata tajam dimuka umum. Tingkah laku sebagian orang Madura dianggap kasar oleh suku dayak dan suku melayu di Kalbar, bahkan tanpa alasan yang serius suka menusuk dalam setiap percekocokkan.

Dalam kejadian seperti ini, aparat negara sering lamban mengambil tindakan tegas terhadap pelakunya, bahkan aparat negara terkesan memihak kepada warga pendatang, sehingga mendorong orang Dayak untuk menghakimi sendiri pelaku tindak kriminal itu.

Beberapa persoalan konflik etnis yang ditemukan berdasarkan pendekatan wacana adalah *pertama*, peran negara secara terselubung telah menciptakan kekerasan (Political violence) dengan memarginalisasikan orang Dayak untuk mempertahankan aliansinya dengan pelaku-pelaku bisnis (konglomerat) yang telah mengeksploitasi sumber daya hutan di Kalimantan Barat. *Kedua*, eksploitasi sumber daya hutan oleh pengusaha HPH yang telah mengganggu hak-hak adat, system mata pencarian dan system ritual warga masyarakat Dayak tergolong dalam kekerasan budaya (cultural Violence) yang mendorong timbulnya kemiskinan dan kerusakan lingkungan. *Ketiga*, persoalan hukum akibat pertikaian, menggunakan dasar untuk digunakannya hukum adat yang hidup dalam masyarakat Dayak, sebagai solusi dalam penyelesaian pertikaian tersebut. *Keempat*, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat dayak merupakan reflektivitas atas perlakuan terhadap warga Dayak sebagai obyek pembangunan

dan melakukan perlawanan, sebagai tindakan rasional untuk meraih posisi sebagai pelaku pembangunan di daerahnya sendiri.

3. Kebudayaan Dyak dalam Bingkai Konstruksi Sosial

Sejak istilah kebudayaan untuk pertama kalinya digunakan oleh Tylor dalam bukunya *Primitive Culture* (1871) ia sudah memasukkan pengetahuan dalam konsep kebudayaan. Kebudayaan didefinisikan sebagai keseluruhan kompleksitas yang terdiri dari pengetahuan, keyakinan, nilai, norma, hukum, adat, kebiasaan dan kapabilitas lain serta kebiasaan apa saja yang diperoleh seorang manusia sebagai anggota masyarakat.

Konsep kebudayaan yang menekankan pada unsur pengetahuan yaitu, P. Suparlan (1986 : 115) dan P. Spradley (1997 : 5). Mereka mendefinisikan kebudayaan sebagai perangkat pengetahuan yang diperoleh dan digunakan untuk menginterpretasikan pengetahuan dan melahirkan tingkah laku sosial. Definisi ini memperlihatkan bahwa kebudayaan itu adalah sesuatu yang dinamik dan dapat berubah dalam arti bahwa kebudayaan itu merupakan sesuatu yang dapat dibentuk, suatu konstruksi sosial yang berkaitan erat dengan kepentingan maupun kekuasaan pelaku.

Dalam kerangka pemikiran konstruksi sosial, kebudayaan adalah proses pelebagaan pengetahuan (*institutionalization*) kedalam masyarakat melalui dinamika dan kreativitas aktornya yang merupakan bagian dari realita sosial.

Pemikiran yang menempatkan aktor sebagai pelaku yang aktif dan kreatif dalam dunia keseharian bersumber dari pemikiran Weber bahwa tindakan manusia menjadi suatu hubungan rasional bila manusia memberikan arti atau makna tertentu terhadap tindakannya itu dan manusia lain memahami tindakan itu sebagai sesuatu yang penuh arti (Ritzer, 1992 : 69). Tindakan bermakna bagi

Schultz dianggap sebagai “kenyataan tertinggi” (*paramount reality*) didalam pengalaman manusia. Kenyataan tertinggi itu adalah dunia kehidupan sehari-hari seperti yang duhadapi orang-orang, menjadi tempat bertindak dan melalui dunia itu mereka hidup (Geertz: 152). Pemikiran Schutz ini menempatkan pengalaman individu tersebut sebagai realita, dan kekhasan (*tyfication*). Dengan demikian, suatu kelompok sosial tertentu dipahami dan dihadapi sebagai sesuatu yang ditempatkan didalam sebuah kategori generalis yang “khas” mereka dan membiarkan pengalaman hidup sebagai data dasar dari suatu realitas.

Realitas sosial dalam pemikiran Berger dan Luckman diterima sebagai realitas ganda, yaitu realitas dalam dimensi obyektif (*society as objective reality*) dan dimensi subyektif (*society as subjective reality*). Realitas dalam dimensi obyektif, dipahami sebagai proses pelembagaan (*institutionalization*) yang menggambarkan hubungan dialetika antara individu dan masyarakat melalui proses eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi (Berger dan Luckmann, 1990: 87). Eksternalisasi menunjukkan pada kegiatan kreatif manusia dalam melihat dunia luar; obyektivasi menunjukkan pada proses diman kenyataan eksternal itu menjadi bagian dari kesadaran subyektif individu bersenyawa mengkomfirmasikan individu sebagai obyektif, dan internalisasi menunjukkan pada proses dimana kenyataan eksternal itu menjadi bagian dari kesadaran subyektif individu. Berdasarkan pemahaman atas hubungan dialektik antara individu dan masyarakat tersebut, terdapat tiga tahapan dialetika dalam realitas sosial, yaitu masyarakat sebagai produk manusia (*society is human product*); masyarakat sebagai realitas obyektif (*society as objective reality*) dan manusia adalah produk masyarakat (*man is sosial product*).

Realitas dalam dimensi subyektif, dipahami sebagai proses internalisasi, yaitu proses distribusi pengetahuan terhadap individu sebagai anggota masyarakat.

Proses internalisasi tersebut melibatkan peranan orang-orang yang berpengaruh dalam kehidupan individu dan penggunaan bahasa sebagai media komunikasi dan pelukisan suatu realitas untuk memelihara realitas subyektif secara efektif. Selain itu realitas realitas subyektif selalu tergantung kepada struktur kemasukakalan (*plausibility*) tertentu. Artinya landasan sosial dari proses-proses sosial tertentu yang diperlakukan untuk memelihara realitas subyektif (Berger dan Luckmann, 1990: 220-221).

Budaya Betang yang merupakan salah satu dari kebudayaan Dayak dalam kerangka pikir konstruksi sosial yang terdapat dalam realitas obyektif, dipahami oleh warga masyarakat Dayak sebagai media pemersatu (*universum simbolik*) dalam masyarakat yang berbeda agama, etnis dan komunitas. Dunia keseharian mereka diwarnai oleh kegiatan ritual seperti upacara Pantan (upacara penerimaan tamu yang menggambarkan keterbukaan masyarakat Dayak), Upacara *Tiwah Besar*, yaitu upacara mengangkat tulang belulang orang yang sudah mati menuju *lewo tatau* (sorga), berhajat dan membayar hajat, upacara *Memparasih Lewo* (mengusir roh jahat) dan acara-acara pesta perkawinan adat yang menampilkan acara kesenian sastra lisan sebagai media mendistribusikan pengetahuan kepada masyarakat. Rangkaian kegiatan ritual dipahami sebagai proses untuk memelihara *universum simbolik* yang dikenal sebagai *Concept Machineries of Universe Maintenance* (CMUM). Disamping itu terdapat pula konsep terapi untuk mencegah terjadinya konflik yaitu kesepakatan Rapat Daamai Tumbang Anoi 1894 yang melarang *kayau mengayau* (pertikaian dengan potong kepala)

Dan kekerasan terhadap kekuatan yang lemah. Kegiatan tersebut melibatkan peranan tokoh-tokoh masyarakat yang kreatif dan dinamik untuk menciptakan

dunia kesehari-harian yang memperkuat pemahaman mengenai *budaya betang*.

Dunia keseharian dalam realitas subyektif yang dipahami sebagai proses pendistribusian pengetahuan tidak pernah mengalami kesempurnaan karena individu selalu dihadapkan pada proses pemahaman yang terus berlangsung dalam diri individu mengenai kehidupan dunia luar dan sekaligus individu sebagai bagian dari dunia realitas tersebut.

Pembangunan sebagai mekanisme perubahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ternyata tidak berpihak kepada masyarakat Dayak, bahkan cenderung memarginalisasikan mereka. Tatanan sosial yang diwarnai oleh kegiatan ritual telah jarang mereka laksanakan dan ada perhimpitan dengan kesulitan ekonomi yang dihadapi mereka pada masa kini. Keadaan ini menyebabkan keterputusan sejarah (*historical discontinue*) karena alat untuk memelihara proses integrasi telah kehilangan makna dan tidak mampu lagi dijelaskan dengan kesaklaran Rapat Damai Tumbang Anoi. Selain itu hubungan-hubungan sosial telah pula mengalami proses kebendaan (*reifikasi*) yang selalu memperhitungkan keuntungan dan kerugian.

Meningkatnya mobilitas penduduk pendatang ke Kalimantan Tengah seiring dengan terbukanya trans Kalimantan dan krisis ekonomi yang berkepanjangan, melanda bangsa Indonesia telah menambah ketegangan masyarakat Dayak, karena kedatangan mereka dikhawatirkan akan menempatkan mereka pada posisi yang marginal. Oleh karena itu pertikaian antar warga Dayak dan warga Madura telah meluas menjadi pertikaian antar etnis yang melegitimasi tindakan kekerasan dan pembantaian dengan menggunakan symbol-simbol agama dan budaya, merupakan hasil interpretasi dari pengalaman subyektif melihat dunia luar dan pengetahuan yang mengendap (*stock of knowledge*).

Uraian singkat diatas bermaksud untuk menjelaskan mengenai dunia keseharian masyarakat Dayak pada masa *integrasi* dan *disintegrasi* yang akan melahirkan masa *reintegrasi*, yaitu suatu konsep integrasi berdasarkan pengetahuan masyarakat Dayak dalam kerangka pemahaman atas konstruksi sosial dari P. Beger dan Thomas Luckmann. Penjelasan singkat ini merupakan awal dari suatu penjelasan yang lebih mendalam (*thick description*) atau sebuah makna.

4. Makna Integrasi Berdasarkan Pemikiran Warga Masyarakat Dayak

Konflik antar etnis di Kalimantan Tengah telah mengangkat harkat dan martabat serta memperkuat identitas masyarakat Dayak yang selama ini telah dimarginalisasikan oleh proses pembangunan. Momentum ini merupakan kebangkitan bagi masyarakat Dayak untuk memperjuangkan masa depan yang berpihak pada warga Dayak pedalaman dan hulu daerah aliran sungai.

Integrasi bagi masyarakat Dayak dipahami swbagai : *pertama*, integrasi budaya, dimana budaya Dayak yang dominan dalam proses integrasi tersebut. Kondisi ini dimaksudkan sebagai wujud untuk mengedepankan identitas Dayak ; *kedua*, perjuangan untuk melawan ketidakadilan dan kesejahteraan warga masyarakat Dayak, yang merupakan reflektivitas warga masyarakat untuk memperbesar peranan sebagai pelaku dalam proses pembangunan.

Dalam proses peradaban di Kalimantan Tengah, peristiwa sejarah Rapat Damai Tumbang Anoi pada tahun 1894 di sebuah rumah Betang (long house), merupakan tonggak peradaban baru dan kebangkitan masyarakat Dayak. Peristiwa ini disamping telah berhasil menghentikan *hahunu* (saling membunuh), *hakayau* (saling potong kepala), *hajipen* (saling memperbudak), sekaligus pula diberlakukannya hukum adat sebagai alat untuk mengatur hubungan antar warga

masyarakat. Sejak peristiwa itu, pertikaian antar warrga masyarakat selalu dapat didamaikan melalui hokum adat yang seiring dengan berkembangnya “Budaya Berang” sebagai wahan yang mempersatukan dan pedoman bagi tindakan masyarakat Dayak.

Budaya Berang ini, dipahami oleh warga masyarakat Dayak sebagai tindakan kolektif dalam menghadapi permasalahan kehidupan sehari-hari, seperti kegiatan perladangan dan mencari hasil hutan. Dalam hal ini, nilai kepercayaan (*trust*) merupakan unsure utama bagi interaksi antar warga Dayak, walaupun semangat bersaing cenderung kurang dimiliki oleh warga masyarakat Dayak. Oleh karena itu sifat ulet dan agresif dari warga Madura yang telah menguasai kota Saampit, merupakan ancaman bagi warga Dayak.

Ancaman ini berkembang menjadi konflik terbuka ketika isu yang berkembang telah menodai harga diri yang dianggap identik dengan masuknya roh jahat yang mengganggu kehidupan warga Dayak, sehingga dimulailah tindakan *mangariyau* (memanggil roh) yang dapat merasuk dalam tubuh manusia, sehingga seorang yang kerasukan (*posses*) berada dalam keadaan tanpa sadar (*trance*). Peperangan segera mereka lakukan, bersamaan dengan *bunyi lahap* (peking peperangan) dan *menawur beras* (menabur beras)

Sebelumnya pertikaian antar warga Dayak dan Madura, sejak tahun 1982 hingga tahun 2000 tercatat sebanyak sepuluh kali (Banjarmasin Pos, Februari 2001) namun belum sampai pada tindakan kekerasan yang bersifat komunal. Pembauran pun telah terjadi secara alami melalui perkawinan yang telah berlangsung lama dan banyak warga Madura yang sama sekali tidak tahu mengapa ada pertikaian dengan warga Dayak, seperti isu yang dihembuskan kepada mereka. Disamping itu keterikatan warga Dayak terhadap hokum adat,

menyebabkan mereka menghindari tindakan kriminal yang sewenang-wenang.

Ted Gurr (1995 : 124 dalam bukunya yang berjudul *Minorities At Risk, A Global View Ethnopolitical Conflict*, menyebutkan bahwa kekerasan dilakukan oleh kekuatan politik dengan memobilisasi kelompok (*primordialisme*) yang sedang berada dalam kondisi yang lemah dan keresahan (*Grivances*) akibat tekanan ekonomi dan politik (*instrument*). Faktor keresahan dan lemahnya kondisi masyarakat, yang didukung oleh kuatnya sentimen kelompok sangat mudah meluapnya emosi secara spontanitas, walaupun tekanan dari luar sangat kecil. Seperti kelompok kulit hitam di Afrika Selatan dan suku Kurdi di Irak.

Kekuatan gerakan politik dan berlanjutnya konflik dikendalikan dan diarahkan oleh pimpinan-pimpinan kelompok (*Group Leader*) dengan memberikan pernyataan –pernyataan yang masuk akal (*plausible*) terhadap kelompok identitas (*Group Identity*) yang mengalami Keresahan dan terhambatnya penyaluran aspirasi mereka.

Mengacu pada pendapat Ted Gurr, maka konflik etnis ini telah menjadi alat bagi kepentingan kelompok tertentu yang menimbulkan kerugian dan kesengsaraan masyarakat yang bertikai.

Proses integrasi antar etnis yang bertikai diarahkan pada integrasi budaya, dimana budaya Betang yang lebih menonjolkan persamaan (*inclusive*) dan hukum adat yang menitikberatkan pada cara-cara kompromi seperti *hukuman daha* (saling minum darah) dan *jipen* (denda), telah membuka peluang damai antara warga Madura dengan warga masyarakat Dayak. Oleh karena itu budaya Madura yang bersifat eksklusif seperti budaya corok yang perlu direkonstruksi sehingga bias sesuai dengan budaya Betang. Disamping itu, Budaya Betang pun perlu dikembangkan sehingga memiliki fleksibilitas terhadap budaya etnis lainnya.

Hasil kongres rakyat Kalimantan Tengah pada 4 – 7 Juni 2001 antara lain menyepakati untuk menerima dengan bersyarat bagi wanita Madura yang ingin kembali ke Kalimantan Tengah dan memenuhi hukum adat yang berlaku di masing-masing daerah Kabupaten/kota serta menempatkan pemerintah pusat sebagai mediator dalam proses perdamaian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Berger, P dan Luckmann, T (1990). *Tafsir Sosial Atas Kenyataan. ILP3ES* : Jakarta.
- Berry, John W. et.al (1999). *Psikologi Lintas Budaya : Riset dan Aplikasi*. PT. Gramedia : Jakarta.
- Blondel, J (1995). *Comperative Government*. London : Prentice Hall
- Chandra Kirana, (1989), *Geertz dan Masalah Kesukuan. Prisma No. 2*
- Geertz, Clifford (1992). *Tafsir Kebudayaan*. Terjemahan oleh Fransisco Budi Hardiman. Yogyakarta : Kanisius.
- Gurr, Ted Robert (1995) *Minorities At Risk : A Global Ethnopolitical Conflicts. Washington* : Institute of Peace Press.
- Hariyanto, I (1998), *Melangkah Dari Reruntuhan Tragedi Situbondo*. Jakarta Grasindo.
- Hefner, Robert W. (1999). *Geger Tengger, Perubahan Sosial dan Perkelahian Politik*. LkiS : Yogyakarta.
- Human Right Watch / Asia (1998). *Konflik Etnis di Kalimantan Barat* (terjemahan Harian / Hartono), Yogyakarta : Institut Arus Informasi.
- Huntinton, Samuel P, (2000). *Benturan AntarPeradaban dan Masa Depan Politik Dunia* (Terjemahan M. Sadat Iamail), Yogyakarta : Qalam.
- Liddle, William (1970), *Ethnicity, Party and Nationality Integration, In Indonesia Case Study*. New Haven and London : Yale University.
- Liem, Yusu (2000). *Prasangka Terhadap Etnis China*. Jakarta : Djembatan
- Patebang Edi (2001), *Amuk Sampit Palangkaraya Raya. Pontianak* : Institut Dayakologi.
- Putra, Nico Andas dan Djuweng, Stepanus (1989). Sisi Gelap Kalimantan Barat : *Perseteraan etnis Dayak – Madura 1997* : Pontianak : IDR & ISAL
- Ritzer, Goerge (1992). *Sosiologi Ilmu pengetahuan Berparadigma Ganda*. (Terjemahan Ali Mandra) Rajaawali Pers : Jakarta

Spradley, James P. (1997). *Metode Etnografi*. Yogyakarta : PT. Tiara Wacana.